



Analisis Kebijakan Gaji Honorer Madrasah Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Kabupaten Garut

Haliza Malika Putri Budiman^{1*}, Abdullah Ramdhani²

Universitas Garut

halizaputribudiman@gmail.com¹ , aramdhani@fisip.uniga.ac.id²

ARTICLE INFO

History of the article :

Received 26 Januari 2026

Revised 12 Februari 2026

Publish 25 Juni 2026

Keywords:

salary policy, honorary teachers, Madrasah Aliyah

ABSTRAK

Madrasah Aliyah honorary teachers have a strategic role in the implementation of secondary level Islamic education, but the economic welfare of honorary teachers is still a serious problem, especially related to the salary policy that is not yet uniform and not oriented to the standard of living needs. This study aims to analyze the salary policy of Madrasah Aliyah honorary teachers and its influence on the level of economic welfare of madrasah teachers in Garut Regency. This study uses a descriptive quantitative approach with a simple linear regression analysis method. Primary data was obtained through the distribution of questionnaires to 94 honorary teachers of Madrasah Aliyah who were selected using a simple random sampling technique from a population of 1,511 teachers. Secondary data was obtained from interviews and official documents of related agencies. The results of the study show that the salary policy of honorary teachers has a positive and significant effect on the level of economic welfare of madrasah teachers. These findings indicate that payroll policies have an important role in determining the ability of honorary teachers to meet their living needs and maintain economic stability. This study concludes that the improvement of the salary policy of honorary teachers is a strategic factor in improving the economic welfare of Madrasah Aliyah teachers, and is expected to be a consideration for the government and madrasah managers in formulating a fairer and more sustainable salary policy.

PENDAHULUAN

Guru honorer Madrasah Aliyah memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pendidikan Islam tingkat menengah, serta tidak hanya sebagai pendidik akademik, tetapi juga sebagai pembentuk karakter, moral, dan nilai-nilai keagamaan peserta didik. Peran tersebut menuntut profesionalisme dan tanggung jawab yang tinggi, sehingga kesejahteraan ekonomi guru menjadi faktor penting yang memengaruhi kualitas pembelajaran, motivasi kerja, serta keberlanjutan profesi guru itu sendiri (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen). Namun dalam praktiknya, kesejahteraan ekonomi guru honorer Madrasah Aliyah masih menghadapi persoalan serius, khususnya terkait kebijakan penggajian. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa gaji guru honorer di Indonesia pada umumnya berada jauh di bawah standar kebutuhan hidup layak. (Rangkuti & Ramadhani, 2021) menemukan bahwa sebagian besar guru honorer menerima gaji berkisar antara Rp300.000 hingga Rp1.000.000 per bulan, jumlah yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara tuntutan profesionalisme guru dengan kebijakan pengupahan yang diterapkan di satuan pendidikan.

Secara normatif, pengupahan tenaga kerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menegaskan bahwa sistem pengupahan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Garut menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 29 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Pegawai/Jasa untuk Belanja Daerah Tahun 2022 yang kemudian direvisi melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 123 Tahun 2022. Peraturan tersebut menjadi acuan dalam penyusunan anggaran belanja daerah, termasuk belanja pegawai dan jasa yang tertuang dalam (Perbup Garut No. 123 Tahun 2022) (Pengelolaan et al., 2022) Namun, regulasi ini pada praktiknya lebih banyak berlaku bagi belanja yang bersumber dari APBD dan belum secara spesifik mengatur standar gaji guru honorer Madrasah Aliyah, terutama yang berada di bawah naungan yayasan swasta.

Kondisi tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bagian Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Garut yang menunjukkan bahwa hingga saat ini tidak terdapat kebijakan khusus dari Kementerian Agama Kabupaten Garut mengenai standar gaji guru honorer Madrasah Aliyah. Kebijakan penggajian sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing madrasah atau yayasan penyelenggara pendidikan (Kemenag Kabupaten Garut, 2025). Akibatnya, sistem penggajian guru honorer bersifat tidak seragam dan sangat bergantung pada kemampuan finansial lembaga pendidikan.

Praktik kebijakan tersebut dapat dilihat di salah satu Madrasah Aliyah yang berada di daerah selatan yaitu di Madrasah Aliyah Ma'arif Cikelet Garut, yang tercantum melalui Surat Keputusan Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif MWC Cikelet Garut Nomor 023/LPM/Kep.VII/2000 tentang Pengangkatan Guru Sukwan. Surat keputusan ini menekankan aspek administratif pengangkatan guru berdasarkan kebutuhan pembelajaran dan kompetensi, namun belum mengatur secara eksplisit standar gaji, besaran honor, maupun jaminan kesejahteraan ekonomi guru honorer. Hal ini mencerminkan bahwa kebijakan gaji di tingkat madrasah lebih bersifat internal dan belum berbasis pada standar kesejahteraan yang memadai (LP Ma'arif MWC Cikelet, 2000).

Berbagai penelitian terdahulu menguatkan bahwa kebijakan gaji yang rendah berdampak langsung terhadap kesejahteraan ekonomi guru honorer. Penelitian (Dhobith, 2024) dalam Jurnal Paramurobi menunjukkan bahwa rendahnya gaji guru honorer yang tidak sebanding dengan beban kerja menyebabkan rendahnya kesejahteraan hidup dan memaksa guru mencari pekerjaan tambahan. Temuan ini diperkuat oleh penelitian (Siburian et al., 2024) dalam Jurnal Pendidikan Tambusai yang menyatakan bahwa remunerasi yang tidak memadai berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja, motivasi, dan stabilitas ekonomi guru honorer. Selanjutnya, (Klanderan, 2024) menegaskan bahwa upah guru honorer yang berada di bawah standar pengupahan nasional tidak hanya bertentangan dengan regulasi ketenagakerjaan, tetapi juga menimbulkan ketidakamanan ekonomi dan menurunkan kualitas kerja guru.

Dalam perspektif teori kebijakan publik William N. Dunn, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya proses perumusan dan implementasi kebijakan, terutama pada tahap penetapan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Ketika tidak terdapat kebijakan gaji yang jelas dan mengikat dari otoritas pemerintah, maka tujuan kebijakan untuk menjamin kesejahteraan guru tidak tercapai secara optimal (Publik et al., 2023). Sementara itu, menurut Teori Kesejahteraan Ekonomi Amartya Sen, kesejahteraan tidak hanya diukur dari besaran pendapatan, tetapi juga dari kemampuan (capability) individu dalam memenuhi kebutuhan dasar, mencapai keamanan ekonomi, serta menjalani kehidupan yang layak. Gaji yang rendah dan tidak stabil membatasi capability guru honorer Madrasah Aliyah dalam meningkatkan kualitas hidupnya (Pemikiran et al., 2024)

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada satu permasalahan utama, yaitu sejauh mana kebijakan gaji guru honorer Madrasah Aliyah di Kabupaten Garut berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi guru madrasah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kebijakan gaji guru honorer Madrasah Aliyah serta pengaruhnya terhadap tingkat kesejahteraan

ekonomi guru Madrasah Aliyah di Kabupaten Garut, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, Kementerian Agama, serta pengelola madrasah dalam merumuskan kebijakan penggajian yang lebih adil dan berorientasi pada kesejahteraan guru honorer.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan tujuan untuk menganalisis kebijakan gaji guru honorer di Madrasah Aliyah serta dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi guru madrasah di Kabupaten Garut. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan pengukuran hubungan antarvariabel secara objektif dan sistematis berdasarkan data numerik yang diperoleh dari responden.

Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada guru honorer Madrasah Aliyah. Pernyataan dalam kuesioner disusun dengan mengacu pada konsep kebijakan pengupahan dan teori kesejahteraan ekonomi, yang mencakup aspek pendapatan, kemampuan memenuhi kebutuhan hidup, serta kondisi ekonomi rumah tangga guru honorer. Penggunaan kerangka teoritis tersebut bertujuan untuk mengkaji sejauh mana kebijakan gaji yang diterapkan berkontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi guru madrasah secara terukur. Selain data primer, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara serta dokumen resmi instansi terkait, seperti Kementerian Agama dan pengelola madrasah di Kabupaten Garut.

Variabel penelitian terdiri dari kebijakan gaji guru honorer sebagai variabel independen dan tingkat kesejahteraan ekonomi guru madrasah sebagai variabel dependen. Pengukuran variabel dependen dilakukan berdasarkan persepsi guru honorer terhadap kondisi ekonomi yang mereka rasakan selama menjalankan tugas sebagai pendidik di Madrasah Aliyah (Ambarawadi et al., 2025).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru honorer Madrasah Aliyah di Kabupaten Garut yang berjumlah 1.511 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan probability sampling dengan metode simple random sampling, sehingga setiap guru honorer memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai responden. Penentuan jumlah sampel dilakukan menggunakan rumus Slovin, mengingat besarnya populasi dan kebutuhan untuk memperoleh sampel yang representatif dengan perhitungan yang sederhana (Rumah & Lembang, 2020). Dengan tingkat kesalahan (e) sebesar 10% dan populasi (N) sebanyak 1.511 guru, maka diperoleh jumlah sampel minimum sebanyak 94 responden.

Berdasarkan kerangka teoretis ini, maka peneliti mengajukan tiga hipotesis:

$$\begin{aligned}
 n &= \frac{1.511}{1 + 1.511(0,10)^2} \\
 n &= \frac{1.511}{1 + 1.511(0,01)} \\
 n &= \frac{1.511}{1 + 15,11} \\
 n &= \frac{1.511}{16,11} \\
 n &= 93,79 \approx 94
 \end{aligned}$$

Gambar 1. Metode

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan analisis regresi linear sederhana untuk mengetahui besarnya pengaruh kebijakan gaji terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi guru honorer (Almumtazah et al., 2021). Selain itu, digunakan pula analisis statistik

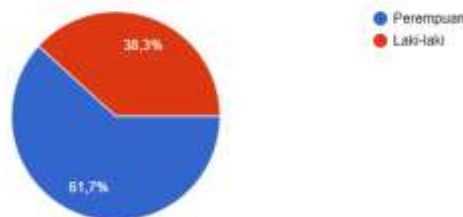
deskriptif, seperti frekuensi, persentase, dan nilai rata-rata, untuk menggambarkan karakteristik serta kecenderungan jawaban responden. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu guru honorer Madrasah Aliyah, sedangkan alat bantu analisis yang digunakan berupa tabulasi data dan perangkat lunak statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

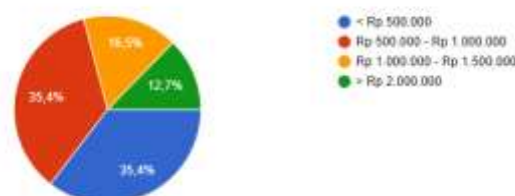
Pada bagian ini disampaikan hasil analisis data mengenai pengaruh kebijakan gaji guru honorer di Madrasah Aliyah terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi guru madrasah di Kabupaten Garut. Analisis data dilakukan menggunakan model regresi linear sederhana, dengan kebijakan gaji guru honorer sebagai variabel bebas dan kesejahteraan ekonomi guru madrasah sebagai variabel terikat. Proses pengolahan data dilakukan dengan memanfaatkan perangkat lunak statistik agar hasil analisis bersifat objektif, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penerapan regresi linear sederhana bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan pengupahan guru honorer berkontribusi terhadap perubahan kondisi kesejahteraan ekonomi guru madrasah. Melalui analisis ini, dapat diketahui hubungan antara kebijakan gaji yang diterapkan dengan kemampuan ekonomi guru honorer dalam memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan taraf kesejahteraan (Merdja & Seto, 2020). Hasil analisis yang diperoleh diharapkan mampu memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas kebijakan gaji guru honorer sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi guru madrasah di Kabupaten Garut. Selanjutnya, hasil pengolahan data disajikan dalam bentuk analisis statistik sebagai berikut:



Gambar 2. Responden

Berdasarkan diagram diatas kebanyakan guru madrasah aliyah di dominasi oleh perempuan, yaitu sebesar 61,7%, sedangkan laki-laki hanya 38,3%. Selain itu juga rata rata gaji yang mereka terima < Rp.500.000-Rp. 1.000.000 perbulan, hal tersebut dapat dilihat dari diagram berikut:



Gambar 3. Pendapatan

Berdasarkan diagram yang tercantum 35,4% guru-guru madrasah aliyah yang berstatus honorer menerima gaji kisaran Rp. 500.000- Rp.1.000.000, dari nominal tersebut sangat jauh untuk

memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Maka dengan menganalisis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap Guru Honorer Madrasah Aliyah di Kabupaten Garut.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,743 ^a	,552	,547	10,502

a. Predictors: (Constant), Kebijakan_Gaji

b. Dependent Variable: Kesejahteraan_Ekonomi

Gambar 4. Hasil Pembahasan

Dilihat dari hasil olah data tabel model summary diperoleh nilai koefisien korelasi R sebesar 0,743 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara kebijakan gaji guru honorer terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi guru madrasah. Pada R Square terdapat nilai sebesar 0,552 mendeskripsikan bahwa 55,2% variasi kondisi tingkat kesejahteraan ekonomi guru madrasah terhadap kebijakan gaji guru honorer madrasah aliyah. Sementara itu, sisanya sebesar 44,8% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

Dan untuk nilai Adjusted R Square sebesar 0,547 yang menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan sudah cukup baik dan stabil dalam menjelaskan hubungan antar variabel, meskipun disesuaikan dengan jumlah sampel penelitian. Sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan gaji guru honorer memiliki kontribusi yang kuat terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi guru Madrasah Aliyah di Kabupaten Garut. Selain itu terdapat tabel Anova untuk melihat nilai signifikansi terhadap antar variabel, berikut tabelnya:

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	12499,384	1	12499,384	113,325	,000 ^b
	Residual	10147,350	92	110,297		
	Total	22646,734	93			

a. Dependent Variable: Kesejahteraan_Ekonomi

b. Predictors: (Constant), Kebijakan_Gaji

Gambar 5. Hasil Pembahasan

Dapat dilihat bahwa dari tabel anova diatas Hasil uji F pada tabel ANOVA menunjukkan nilai F hitung sebesar 113,325 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa model regresi yang digunakan layak dan signifikan, sehingga kebijakan gaji guru honorer madrasah aliyah berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi guru madrasah.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	26,509	6,242		4,247	,000
	Kebijakan_Gaji	1,689	,159	,743	10,645	,000

a. Dependent Variable: Kesejahteraan_Ekonomi

Gambar 6. Hasil Pembahasan

Berdasarkan hasil olah data diatas nilai konstanta sebesar 26,509 menunjukkan bahwa apabila kebijakan gaji guru honorer madrasah aliyah dianggap tidak ada atau bernilai nol, maka tingkat kesejahteraan ekonomi guru madrasah tetap berada pada nilai sebesar 26,509. Selain itu, nilai koefisien regresi kebijakan gaji sebesar 1,689 dan bernilai positif, yang berarti bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam kebijakan gaji akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi 1,689 satuan.

Dan untuk uji t menunjukkan nilai t hitung sebesar 10,645 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan gaji guru honorer madrasah aliyah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi guru madrasah di kabupaten Garut. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian ini menyatakan kebijakan gaji guru honorer madrasah aliyah berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi guru madrasah di kabupaten Garut dapat diterima (Wajdi & Perkasa, 2022).

B. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan gaji guru honorer di Madrasah Aliyah berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi guru madrasah di Kabupaten Garut. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan pengupahan memiliki peran penting dalam membentuk kondisi ekonomi guru honorer, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup dasar dan menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga (Oktafiana, n.d.)

Dalam perspektif teori kebijakan publik William N. Dunn, kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan pemerintah yang dirancang untuk memecahkan masalah publik (Azizah, 2022). Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan adalah perumusan dan implementasi kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan gaji guru honorer Madrasah Aliyah masih belum dirumuskan secara jelas dan belum diimplementasikan secara seragam, sehingga tujuan kebijakan untuk menjamin kesejahteraan guru belum tercapai secara optimal. Ketidakhadiran standar gaji yang mengikat dari pemerintah menyebabkan kebijakan penggajian diserahkan kepada masing-masing madrasah atau yayasan, yang pada akhirnya menimbulkan ketimpangan kesejahteraan antar guru honorer (Prihutami Rindang Brili, 2019).

Dari sisi variabel dependen, tingkat kesejahteraan ekonomi guru madrasah, penelitian ini sejalan dengan Teori Kesejahteraan Ekonomi Amartya Sen yang menyatakan bahwa kesejahteraan tidak hanya ditentukan oleh besarnya pendapatan, tetapi juga oleh kemampuan (capability) individu untuk menjalani kehidupan yang layak (Sudibia & Badung, 2023). Dalam konteks guru honorer Madrasah Aliyah, kebijakan gaji yang rendah dan tidak stabil membatasi kemampuan guru dalam memenuhi kebutuhan dasar, mencapai keamanan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup. Dengan demikian, kebijakan gaji tidak hanya berdampak pada aspek finansial, tetapi juga pada peluang dan kemampuan guru dalam menjalani peran profesionalnya secara optimal.

Hasil penelitian ini juga mendukung temuan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa rendahnya gaji guru honorer berdampak pada rendahnya kesejahteraan ekonomi, motivasi kerja, dan kepuasan kerja guru (Karyawan et al., 2020). Kondisi tersebut mendorong sebagian guru honorer untuk mencari pekerjaan tambahan di luar profesinya, yang berpotensi mengurangi fokus dan kualitas kinerja dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, kebijakan gaji guru honorer perlu dipandang sebagai instrumen strategis dalam pembangunan kualitas pendidikan madrasah.

Meskipun kebijakan gaji terbukti berpengaruh terhadap kesejahteraan ekonomi guru honorer, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kesejahteraan guru tidak sepenuhnya ditentukan oleh kebijakan gaji semata. Faktor lain seperti tunjangan, beban kerja, status kepegawaian, serta dukungan kebijakan pemerintah turut berkontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi guru. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif dalam meningkatkan kesejahteraan guru honorer Madrasah Aliyah.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan gaji guru honorer di Madrasah Aliyah berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi guru madrasah di Kabupaten Garut. Kebijakan penggajian yang diterapkan saat ini memiliki peran penting dalam menentukan kemampuan guru honorer untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga (Astuti & Rianto, 2022).

Penelitian ini menunjukkan bahwa belum adanya kebijakan gaji yang jelas, seragam, dan berorientasi pada standar kesejahteraan menyebabkan tingkat kesejahteraan ekonomi guru honorer Madrasah Aliyah masih berada pada kondisi yang kurang optimal. Temuan ini menguatkan tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis hubungan antara kebijakan gaji dan kesejahteraan ekonomi guru, serta menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan guru honorer tidak dapat dilepaskan dari perbaikan kebijakan penggajian.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan gaji guru honorer merupakan faktor strategis yang perlu mendapat perhatian serius dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi guru Madrasah Aliyah dan mendukung keberlanjutan pendidikan Islam tingkat menengah di Kabupaten Garut.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kebijakan gaji guru honorer di Madrasah Aliyah terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi guru madrasah di Kabupaten Garut, disarankan agar pemerintah daerah dan Kementerian Agama dapat memberikan perhatian yang lebih serius terhadap sistem penggajian guru honorer. Perumusan kebijakan gaji yang lebih jelas, terstandar, dan berorientasi pada kebutuhan hidup layak guru honorer perlu dilakukan agar kesejahteraan ekonomi guru dapat meningkat secara berkelanjutan dan tidak sepenuhnya bergantung pada kemampuan finansial masing-masing madrasah atau yayasan.

Selain itu, pengelola Madrasah Aliyah dan yayasan penyelenggara pendidikan diharapkan dapat menyusun kebijakan penggajian yang lebih transparan dan adil, dengan mempertimbangkan beban kerja, tanggung jawab, serta peran strategis guru honorer dalam proses pendidikan. Upaya optimalisasi sumber pendanaan, baik melalui dukungan pemerintah maupun pengelolaan internal lembaga, perlu terus dilakukan sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan guru honorer (Sutantina et al., 2025).

Bagi guru honorer Madrasah Aliyah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dan dasar untuk mendorong komunikasi yang konstruktif dengan pihak pengelola dan pemangku kebijakan terkait pentingnya kesejahteraan ekonomi sebagai penunjang profesionalisme dan kualitas pembelajaran. Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian yang lebih luas dengan menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kesejahteraan ekonomi guru honorer, serta menggunakan pendekatan penelitian yang lebih beragam agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam.

REFERENSI

- Almumtazah, N., Azizah, N., Putri, Y. L., Negeri, I., & Ampel, S. (2021). Prediksi Jumlah Mahasiswa Baru Menggunakan Metode Regresi Linier Sederhana. 18, 31–40.
- Ambarawadi, N., Maunah, B., & Junaris, I. (2025). Strategi Peningkatan Kesejahteraan Guru Melalui. 10(3), 1321–1330.

- Astuti, D., & Rianto, M. R. (2022). Pengaruh Lingkungan Kerja , Gaji , Dan Motivasi Terhadap Kinerja. 1(2), 0–6.
- Azizah, L. L. (2022). (Bos) Melalui Teori William Dunn (Studi Kasus Pada Sdn Lidah Kulon I / 464 Surabaya). 48–57.
- Dhobith, A. (2024). Analisis Kebijakan Gaji Guru Honorer Terhadap Kesejahteraan Hidup Guru Honorer Di Indonesia. *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*. <https://Ojs.Unsiq.Ac.Id/Index.Php/Paramurobi/Article/View/6609>
- Karyawan, K., Bpd, P. T., Timur, J., Sampurno, B., & Herlambang, T. (2020). Pengaruh Gaji , Tunjangan , Dan Bonus Terhadap Motivasi Kerja Dan. 10(2), 194–205.
- Klanderan, S. D. N. (2024). Penerapan Pp Nomor 36 / 2021 Terhadap Gaji Guru Honorer (Studi Kasus Di.
- Merdja, J., & Seto, S. (2020). Pengaruh Pemberian Gaji Terhadap Motivasi Kerja Dan Profesionalisme Guru Honor. *Pedagogika*, 11(1), 42–48. <https://doi.org/10.37411/Pedagogika.V11i1.99>
- Oktafiana, R. (N.D.). Analisis Kebijakan Kesejahteraan Guru Terhadap.
- Pemikiran, T., Sen, A., & Martha, D. A. N. (2024). Multikultura Menuju Kebijakan Sosial Berorientasi Kapabilitas : 3(4). <https://doi.org/10.7454/Multikultura.V3i4.1071>
- Pengelolaan, P., Daerah, K., Daerah, P., Kabupaten, P. D., Lingkungan, D., & Negara, T. L. (2022). Bupati Garut Provinsi Jawa Barat.
- Prihutami Rindang Brili. (2019). Pengaruh Gaji Honorer Terhadap Motivasi Dan Produktivitas Guru Sekolah Dasarnegeri Kecamatan Blimbing Malang. *Journal Of Social Science Research*, 4, 7050–7061.
- Publik, K., William, V., & Analisis, D. (2023). Dan Implementasi Public Policy By William Dunn : Analysis And. 1(1), 1–9.
- Rangkuti, A., & Ramadhani, P. E. (2021). Kebijakan Sistem Pendidikan Di Kabupaten Aceh Tengah Ditinjau Dari Undang-Undang Dan Fiqih Siyash. *Fakultas Syariah Dan Hukum Uinsu*
- Rumah, U., & Lembang, S. (2020). Strategi Pengembangan Teknologi E-Commerce. 3(1), 1–13.
- Siburian, G., Studi, P., Admnistrasi, M., & Indonesia, U. K. (2024). Analisis Kebijakan Remunerasi Guru Honorer. 8, 29456–29461.
- Sudibia, I. K., & Badung, K. (2023). Can The Welfare Of Hindu Clergy In Bali Be Assessed Using Amartya Sen ' S Capability Approach. 7(1), 121–137. <https://doi.org/10.36526/Js.V3i2.E-Issn>
- Sutantina, T., Maret, U. S., Surakarta, K., Tengah, J., Tarsidi, D. Z., Maret, U. S., Surakarta, K., Tengah, J., Daryanto, J., Maret, U. S., Surakarta, K., & Tengah, J. (2025). Nilai-Nilai Ekonomi Kewarganegaraan Melalui Edupreneurship Sebagai Strategi Peningkatan Kesejahteraan Guru Di Indonesia Suatu Kajian Tentang Peluang , Tantangan , Dan. 10(1).
- Wajdi, F., & Perkasa, D. H. (2022). Pengaruh Gaji Guru Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru Pada Sdit Al-Muddatsiriyah. 8(4), 3950–3963.
- Poerpratama, R. (2025, Oktober 4). Guru Honorer Garut Hidup Di Batas Wajar, Gaji Rp300 Ribu -Janji Manis Baru 2026. <https://Bharatanews.Id/2025/10/04/Guru-Honorer-Garut-Hidup-Di-Batas-Wajar-Gaji-Rp300-Ribu-Janji-Manis-Baru-2026/>.